

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu sektor penggerak untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk membentuk manusia yang berkualitas, mandiri, kreatif, inovatif dan mempunyai kemampuan untuk mengolah potensi yang ada dalam masyarakat untuk mengembangkan dirinya, meningkatkan taraf hidupnya, dan masyarakat disekelilingnya. Sesuai dengan tiga pilar strategi pembangunan yang telah di canangkan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2009-2014 yaitu: pemberdayaan (*empowerment*), kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan pengembangan ekonomi kreatif.

Era globalisasi dan modernisasi pembangunan di Indonesia melahirkan tuntutan, bahwa: *Pertama*, adanya sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki integritas kepribadian, pemikiran, dan keterampilan. *Kedua*, adanya perluasan, dan pemerataan kualitas pendidikan berkelanjutan melalui program pembinaan kursus, kelompok belajar usaha (KBU), magang, beasiswa, dan lain-lain. *Ketiga*, pentingnya pendidikan luar sekolah yang menaruh perhatian di bidang keterampilan yang terintegrasikan dengan permintaan pasar global. Berarti adanya sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan akses, dan pemerataan pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan luar sekolah pada pembekalan keterampilan (Tjiptoherijanto, 1997: 28).

Sumberdaya manusia Indonesia, laki-laki, maupun perempuan diharapkan dapat mengaktualisasikan potensi diri secara optimal, dan melakukan pengolahan potensi sumberdaya alam sekitarnya. Mengingat jumlah pengangguran Indonesia mencapai 40,1 juta dari berbagai karakteristik; 34,6% merupakan pengangguran kelompok usia produktif, realitas tersebut jika tidak dicarikan alternatif pemecahannya akan menyisakan konflik dan gejolak social

yang tanpa ujung. Upaya dalam pengembangan dan menindaklanjuti program-program bidang tenaga kerja, dan bidang pendidikan secara sinergis menyelenggarakan program kecakapan hidup / *life Skills*.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, sebagai satuan pendidikan nonformal. Berarti secara yuridis formal, bahwa PKBM memiliki dasar hukum yang kuat untuk beroperasi di masyarakat. Masyarakat tidak harus merasa khawatir, apabila berkomitmen untuk mendirikan PKBM. Hal ini diimplementasikan dengan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat, maupun daerah untuk mendukung eksistensi PKBM. Walaupun jumlah dana bantuan yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, namun itu semua merupakan suatu dana pancingan sebagai kebijakan yang harus diambil oleh masyarakat dalam mendirikan PKBM.

Secara historis, PKBM yang dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1998, merupakan lembaga yang diadopsi dari tradisi budaya belajar masyarakat Jepang yang melembaga dalam bentuk Kominkan. Kominkan adalah sebuah institusi masyarakat yang tumbuh secara akar rumput (dari, oleh, untuk masyarakat) sesuai dengan kultur keswadayaan masyarakat Jepang. Kominkan berkembang sejak era “Restorasi Meiji” hingga saat ini. Bahkan berdasarkan beberapa riset para pakar pendidikan Jepang, dan para pakar pendidikan Barat, kominkan bukan hanya menjadi salah satu icon Jepang yang handal dalam mendinamisasi proses dan mutu pendidikan orang Jepang, akan tetapi kominkan dapat memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan belajar orang Jepang, baik sebelum, selama, dan sesudah pendidikan formal. Model ini telah diadopsi oleh beberapa negara Asean dan Barat dengan penamaan yang berbeda-beda. Indonesia mengadopsi model ini dengan nama PKBM (Pusat kegiatan belajar masyarakat).

Kominkan (PKBM atau CLC) merupakan model atau lembaga relatif baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, yang diadopsi dari masyarakat Jepang melalui pendekatan *top down*. Langsung diambil oleh pemerintah, sehingga secara empirik PKBM ini tumbuh bagaikan cendawan di musim

penghujan. Apalagi dalam proses mendirikan PKBM diikuti dengan pemberian bantuan dana rintisan dan insentif yang cukup besar dan dengan jangkauan sangat luas. Dalam perjalanan waktu, perkembangan dan kemajuan yang dicapai PKBM sangat beragam sekali. Hal ini kemungkinan dikarenakan oleh beberapa sebab, antara lain: (1) motif pendirian PKBM semata-mata bertujuan untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah saja; (2) komitmen yang lemah, sehingga tidak kunjung muncul jiwa voluntirisme para pengelola PKBM; (3) kemampuan mengelola yang tidak kunjung memadai, meskipun telah dilakukan pelatihan-pelatihan oleh pemerintah. Hal ini diduga menjadi faktor penghambat kemampuan dalam mengelola PKBM mandiri.

Ukuran sukses pelaksanaan program di masyarakat sebagai dampak dari investasi pemerintah, adalah berkembangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat untuk mandiri, baik dengan bekerja pada orang lain, maupun membuka usaha secara mandiri. Secara spesifik, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) yang dikembangkan melalui jalur pendidikan nonformal memiliki sasaran peserta didik yang berasal dari warga masyarakat yang membutuhkan keterampilan untuk bekerja, khususnya masyarakat miskin, tidak sekolah, menganggur, dengan menitikberatkan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan (*vocational*) sesuai dengan kebutuhan pasar, dunia usaha dan dunia industri, serta potensi-potensi lokal yang layak untuk dikembangkan menjadi usaha-usaha ekonomi kreatif, dan produktif.

PKBM sebagai lembaga, maupun sebagai pendekatan pendidikan luar sekolah yang diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, dan tuntutan pasar kerja, serta tersedianya sumber-sumber pendukung lainnya, seperti potensi lokal, dan sumber daya manusia yang terdapat di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas, dan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif sebagai penumbuhkembang kemandirian perekonomian pada peserta didik. PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi lokal untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi,

dan budaya. Tujuan PKBM adalah memperluas kesempatan warga masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental agar terjadi perubahan pola pikir (*mindset*) yang diperlukan untuk perubahan tingkah laku dalam upaya mengembangkan potensi diri, dan bekerja mencari nafkah. Perubahan pola pikir yang terjadi pada masyarakat itulah diharapkan mampu menggerakkan mereka untuk bertingkah laku atau berusaha dalam memenuhi kebutuhan belajarnya secara mandiri (Ruchijat, 2006: 34).

PKBM merupakan sarana untuk mengintensifkan, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat. Pelaksanaan pembelajaran terpusat di berbagai tempat, status mengelola dan pemilikan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap program pendidikan yang diselenggarakannya, bahkan sebagai lembaga yang sangat diharapkan kehadiran dan keberadaannya di masyarakat lingkungan sekitarnya. Partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan suatu program pada lembaga kemasyarakatan.

PKBM sebagai salah satu lembaga sosial kemasyarakatan, dan wadah yang berfungsi sebagai pusat belajar bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi diri, maupun potensi alam lokal, menjadikan keunggulan lokal. PKBM berada di tingkat kecamatan, bahkan kelurahan sebagai basis bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan belajar. Diharapkan PKBM mampu mengembangkan potensi lokal masyarakat, sehingga lembaga, maupun masyarakat menjadi berkembang dan berdaya. Berdaya berarti memiliki kemampuan mengembangkan dirinya sendiri dengan bekal wawasan, sikap, keterampilan, serta pengetahuan melalui pelatihan, pendampingan, dan pembinaan. Pemberdayaan sebagai strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi, social dan transformasi budaya. Partisipasi masyarakat dipercaya sebagai sarana yang sangat efektif untuk menjangkau masyarakat miskin melalui upaya membangkitkan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri, dengan melakukan perubahan mendasar, hingga menyentuh perubahan pola pikir (*mindset*), agar terjadi perubahan tingkah laku

pada diri mereka. Kemiskinan itu terjadi dikarenakan mereka terjebak oleh filosofi hidup mereka, sehingga terbelenggu oleh *mindset*-nya sendiri. Kondisi yang terbelenggu inilah yang harus dibuka oleh pengembang program-program kemasyarakatan.

Kondisi PKBM sampai saat ini dari hasil pengamatan di lapangan masih banyak yang memprihatinkan, karena tidak sedikit dengan kondisi matisuri antara hidup dan mati, kondisi tidak mengalami perkembangan (*stagnan*), kondisi “on of” (mengandalkan bantuan dana dari pemerintah). Adanya kegiatan, apabila memperoleh dana bantuan, dan sebaliknya tidak adanya kegiatan, apabila tidak mendapatkan dana bantuan. Pada hal dana bantuan tersebut dalam satu tahun hanya sekali. Kondisi ini tentunya sangat menyedihkan, karena dimiliki oleh sekitar 30% PKBM, dari 802 PKBM di Jawa Timur. Pengelola kurang memiliki visi, misi, dan komitmen yang kuat dalam pengembangan organisasi, karena terbatasnya wawasan pengelola, terutama dalam mengelola organisasi dan mengelola pembelajaran pada orang dewasa, serta penguasaan kompetensi pengelola. Pengelola kurang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki potensi untuk terlibat dalam sosialisasi program dan lembaga ke masyarakat. PKBM tidak memiliki data base tentang kebutuhan belajar sasaran didik masyarakat sekitarnya. Bahkan tidak dikenal di lingkungan sekitar PKBM tersebut, sehingga pembelajaran tidak dapat berjalan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Belum memiliki visi pengembangan potensi lokal daerah dan masyarakat sekitarnya. PKBM sebagai lembaga belum membangun jaringan dengan mitra kerja dunia usaha dan dunia industri, bahkan instansi terkait, belum mampu mengupayakan produk atau jasa yang menjadi unggulan sebagai penopang pendanaan utama dalam memberi layanan kepada masyarakat. PKBM harus berperan dan berfungsi sosial dan ekonomi, agar sebagai wadah belajar bagi masyarakat dapat diwujudkan oleh PKBM.

Prinsip yang dikembangkan pada PKBM adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Prinsip tersebut sampai saat ini, berarti PKBM belum mampu menjalankannya, karena disinyalir mengelola PKBM masih bersifat tradisional

dan sangat konvensional. PKBM belum mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga, maupun sebagai wadah untuk melayani kebutuhan belajar masyarakat, dalam mewujudkan masyarakat berdaya dan gemar belajar. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting dan strategis untuk dilakukan, dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi pengelola berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian akan mengarah terjadinya perubahan pola pikir, dan tingkah laku pengelola PKBM dalam mengelola PKBM mandiri untuk melayani kebutuhan belajar masyarakat.

PKBM sebagai lembaga strategis bagi pendidikan nonformal harus senantiasa dibangun, dibina, dan dikembangkan, sehingga lembaga tersebut benar-benar dapat menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Sejak tahun 1998 PKBM memiliki akses yang luas, meliputi; bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan. Bidang kajian inilah dijadikan program-program untuk melayani dan pemenuhan kebutuhan belajar masyarakat, yang tentunya melalui identifikasi secara intensif, bertahap, dan terus menerus. Dengan demikian program yang dikembangkan akan berkelanjutan berdasarkan kebutuhan belajar masyarakat. Pemerintah memang telah juga melakukan pembinaan dengan pemberian pelatihan, namun pelaksanaan pelatihan sangat terbatas dan hanya sekali dalam satu tahun, serta tidak mampu melibatkan semua pengelola PKBM. Kondisi PKBM antara kenyataan, dan harapan, masih terjadi kesenjangan yang sangat tajam. Kesenjangan ini harus dilakukan pembenahan dan perbaikan dalam mengelola PKBM agar dapat menjalankan fungsi dan peran yang strategis di masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dengan kondisi masyarakat kita yang masih membangun, sangat membutuhkan kehadiran PKBM mandiri dengan pengelola berkompetensi yang selalu berkembang, dan meningkat dalam mengelola program-programnya.

Mengelola PKBM yang ada saat ini yang masih bersifat tradisional atau konvensional dapat memunculkan permasalahan tersendiri, baik karena faktor internal, maupun faktor eksternal PKBM, termasuk kondisi tiap PKBM yang sangat bervariasi. Pengkategorian PKBM secara tegas belum ada, namun

secara umum kategori itu dapat diamati di lapangan terutama dalam mengelola dan penyelenggaraan program-programnya, baik program reguler, maupun program non reguler. Setiap daerah memiliki Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM), namun selama ini kurang dapat berjalan dengan efektif. Peranan Forum tersebut sangat penting, dan sangat diharapkan dalam membina, dan mendampingi PKBM yang ada, sebagai partner dari pemerintah daerah dalam membina dan memfasilitasi perkembangan PKBM. Forum harus diupayakan mampu menjalankan fungsinya dalam membina dan mengembangkan PKBM, terutama PKBM yang masih mengalami masalah-masalah dalam perkembangannya.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, yang terdiri dari 38 kota / kabupaten. Pemerintah Daerah Jawa Timur melalui Bidang Pendidikan Nonformal-Informal dan Nilai Budaya (PNFI&NB) memiliki komitmen tinggi terhadap keberadaan dan perkembangan PKBM. Dalam dua tahun terakhir telah menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola PKBM secara bertahap dan secara bergantian pada setiap tahunnya. Kegiatan pelatihan ini dinamai Orientasi Teknis bagi pengelola PKBM. Tiap tahun hanya dapat melakukan pelatihan sebanyak dua sampai empat angkatan dengan melibatkan 50 orang pengelola PKBM setiap angkatan, sehingga setiap tahun hanya dapat melatih 100 sampai 200 pengelola PKBM. Penyelenggaraan pelatihan tahun 2010 hanya 3 (tiga) angkatan, dan tahun 2011 dengan 4 (empat) angkatan. Materi pelatihan yang dikembangkan dalam Orientasi Teknis itu, meliputi: kebijakan PNFI, program PNFI & NB berbasis kewirausahaan, manajemen PKBM, revitalisasi PKBM, pemasaran produk dan HAKI, aplikasi pendidikan kecakapan hidup untuk pemberdayaan masyarakat, dan etos kerja dalam mengelola keuangan. Pelaksanaan Orientasi Teknis tersebut melibatkan nara sumber dari Perguruan tinggi, lembaga mitra, praktisi, dan bidang PNFI & NB sendiri. Metode yang digunakan untuk menambah pengetahuan dan membentuk sikap para pengelola PKBM adalah ceramah dan tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Dilaksanakan di suatu tempat selama tiga hari. Hasil yang dicapai masih terbatas pada penambahan

pengetahuan mengenai materi yang diberikan oleh nara sumber kepada peserta, sharing dan silaturahmi antar pengelola, belum diupayakan secara lebih intensif. Belum diupayakan terjadi saling membelajarkan antar pengelola orang dewasa yang melakukan kegiatan bersama-sama.

Dalam pelatihan tersebut belum melakukan langkah-langkah pelatihan yang seharusnya, terutama analisis kebutuhan. Demikian juga belum ada produk yang dihasilkan oleh peserta pelatihan, belum terfokus, masih bersifat umum. Peserta pelatihan dapat mengikuti dengan mendengarkan paparan nara sumber dan sedikit waktu diskusi setiap di akhir pemaparan. Workshop belum dikembangkan untuk menghasilkan produk bagi pengelola PKBM dalam mengelola PKBM mandiri.

Oleh karena itu peneliti mengembangkan model pelatihan ini menjadi lebih komprehensif dan lengkap agar peningkatan kompetensi pengelola PKBM mampu mempersiapkan mengelola PKBM mandiri, dengan memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi setiap pengelola PKBM secara praktek. Kompetensi pengelola PKBM yang akan diberikan pada pelatihan, meliputi: kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi manajerial. Standar minimal manajemen PKBM dan kewirausahaan. Analisis kebutuhan dalam suatu pelatihan pendidikan nonformal merupakan suatu keharusan untuk dilakukan, agar pelatihan mampu memecahkan masalah peserta didik. Keterlibatan peserta didik sejak awal sangat penting agar mereka diharapkan dapat memecahkan masalahnya sendiri, karena mereka adalah orang dewasa, dengan dibantu oleh pelatih dalam mengkoordinasikan dengan pengetahuan akademik, serta pengalaman. Prinsip pembelajaran orang dewasa yang digunakan, sehingga peserta didik menjadi objek sekaligus subyek dalam pelatihan.

Hasil analisis kebutuhan tersebut dijadikan dasar untuk menyusun langkah pelatihan selanjutnya; seperti menyusun materi pelatihan, tujuan pelatihan, metode pelatihan, strategi pelatihan, media pelatihan, instruktur pelatihan, dan evaluasi pelatihan.

Tabel: 1.1.
PKBM dalam Analisis SWOT

No.	SWOT	Kondisi Empiris
1.	<i>Strength</i> (Kekuatan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah PKBM di seluruh Indonesia hampir mencapai 10.000 lembaga. b. Adanya <i>success story</i> sejumlah PKBM ‘terbukti’ mampu mengatasi kebodohan, kemiskinan, dan membangun kesetiakawanan. c. Adanya <i>success story</i> sejumlah alumni PKBM yang ‘berhasil’, memanfaatkan keterampilan untuk dijadikan mata pencaharian. d. Adanya sebagian anggota masyarakat yang telah ‘menikmati’ kehadiran PKBM di tengah-tengah masyarakat. e. PKBM mampu mengakomodasikan berbagai program belajar yang dibutuhkan masyarakat secara simultan. f. PKBM sebagai lembaga dan wahana pendidikan nonformal yang fleksibel, dengan 3 dimensi kegiatan, yaitu pembelajaran, usaha, dan pengembangan masyarakat. g. PKBM diakui dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, sebagai satuan pendidikan nonformal. h. PKBM tumbuh dalam berbagai latar belakang komunitas, maka PKBM sebagai <i>generic model</i> untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat. i. PKBM telah dikenal luas di Negara-negara Asia Pasifik, khususnya Jepang telah memberi <i>impact</i> yang besar bagi kemajuan masyarakatnya. j. Adanya bantuan dana dari pemerintah pusat, maupun daerah untuk mendukung eksistensi PKBM. k. Adanya Forum PKBM di setiap provinsi dan di sejumlah besar Kabupaten/Kota di Indonesia dan sudah dimulainya jaringan PKBM Asia Pasifik.
2.	<i>Weakness</i> atau Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> a. PKBM belum dikenal luas oleh masyarakat dan birokrasi pemerintah, baik secara konseptual, program atau kiprahnya, dan potensi yang dimilikinya; b. PKBM secara umum sangat terbatas pada kelembagaan, personalia, sarana dan prasarana, sistem manajemen dan kepemimpinan yang masih lemah;

-
- c. Adanya PKBM yang berdiri dengan motivasi utama agar memperoleh dana bantuan dari pemerintah untuk kepentingan pribadi, sehingga kurang peduli terhadap pelaksanaan dan mutu program yang menimbulkan citra yang negatif bagi PKBM;
 - d. Belum terbukanya pemerintah dalam menyalurkan dan mendistribusikan anggaran, khususnya yang terkait dengan PKBM;
 - e. Usia PKBM yang masih muda, sehingga masih sangat terbatas kader-kader yang militan untuk memajukan PKBM;
 - f. Stakeholder umumnya masih memandang sebelah mata terhadap keberadaan pendidikan nonformal dan masih men'dewa'kan pendidikan formal, sehingga belajar di PKBM belum menjadi pilihan masyarakat.
-
3. *Opportunity* atau Peluang
- a. Banyaknya permasalahan dan masih rendahnya mutu pendidikan formal, sehingga pendidikan nonformal menjadi alternative, melalui PKBM bagi masa depan pendidikan;
 - b. Adanya tiga dimensi kegiatan PKBM, yang menarik partisipasi masyarakat dan dukungan lembaga-lembaga donor lain yang lebih luas;
 - c. Adanya komitmen global dalam MDGs (*Millenium Development Goals*) yang implementasinya di tingkat akar rumput, yang sebagian besar merupakan ruang cakupan PKBM;
 - d. Adanya komitmen global tentang *Education For All* dan *Life long Learning* yang sebagian besar merupakan ruang cakupan PKBM;
 - e. Berbagai isu-isu global, yang implementasinya dapat dilakukan melalui pendekatan PKBM;
 - f. Berbagai isu nasional, dapat diimplementasikan melalui pendekatan PKBM;
 - g. Menurunnya kepercayaan lembaga-lembaga donor internasional dalam menyalurkan dana bantuannya terhadap pembangunan masyarakat melalui birokrasi pemerintah memungkinkan penyalurannya dilakukan melalui PKBM;
 - h. Banyaknya lembaga-lembaga lokal, nasional, dan internasional yang memberikan kepedulian terhadap
-

persoalan-persoalan pendidikan, kemiskinan, dan pengembangan masyarakat, sebagai cakupan program PKBM;

- i. Adanya kebijakan pemerintah agar BUMN mengalokasikan sebagian keuntungannya bagi dana pengembangan masyarakat, yang dapat menggunakan pendekatan PKBM;
 - j. Adanya sejumlah perusahaan menengah, maupun besar yang memiliki kebijakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan mengalokasikan dana secara konsisten untuk itu, bisa didampingi melalui PKBM;
 - k. Adanya sejumlah besar perguruan tinggi yang memiliki sejumlah besar mahasiswa yang membutuhkan bentuk-bentuk pengabdian masyarakat, PKBM dapat menjadi wahana pengabdian tersebut;
 - l. Adanya sejumlah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan PLS, serta berbagai organisasi mahasiswa yang memberikan kepedulian besar bagi pembangunan, PKBM dapat menjadi alternatif;
 - m. Potensi demografi, geografi, budaya dan sumberdaya ekonomi Indonesia membuka munculnya peluang usaha yang dapat digarap oleh PKBM;
 - n. Kerjasama antar negara-negara Asia Pasifik maupun dengan Negara lain memungkinkan peluang pengembangan usaha, pembelajaran dan pengembangan masyarakat bagi PKBM;
 - o. Adanya amanat konstitusi Negara Republik Indonesia untuk memberikan prioritas kepada pembangunan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar, di mana ruang pendidikan nonformal selama ini masih belum tergarap dengan sewajarnya;
 - p. Adanya komitmen Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menetapkan dasawarsa *Education for Sustainability Development*, dimana PKBM dapat menjadi agen pelaksanaanya;
 - q. PKBM dapat dijadikan alternatif yang kuat dalam mengentas kemiskinan masyarakat, karena PKBM merupakan lembaga yang strategis, apabila kelembagaan PKBM itu kuat dan tangguh, dan
-

	didukung oleh kebijakan program-program PNFI berbasis kewirausahaan.
4. <i>Threat</i> (Ancaman)	<p>a. Adanya potensi konflik di antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan PKBM, dapat menimbulkan usaha-usaha kontra produktif bagi gerakan untuk memajukan PKBM;</p> <p>b. Dapat muncul adanya sinisme sebagian anggota masyarakat terhadap PKBM, jika melihat perilaku beberapa oknum pembina, pengelola dan pelaksana PKBM yang memanfaatkan PKBM untuk mengambil dana bantuan pemerintah ataupun dari pihak donor lain untuk keuntungan pribadi semata.</p> <p>c. Adanya beberapa oknum yang merasa ‘terancam’ akan adanya gerakan PKBM yang murni dan kuat, sehingga membuat langkah-langkah ‘perlawanan’ yang dapat menghambat gerak maju PKBM agar oknum-oknum tersebut tidak kehilangan ‘keuntungan’ dari ‘manipulasi’ dan KKN proyek PKBM;</p> <p>d. Manajerial dan leadership pengelola PKBM yang lemah, menyebabkan lemahnya kelembagaan PKBM, sehingga kurang dipercaya oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program pemerintah yang lebih besar.</p>

Sumber: Forum Komunikasi PKBM (FK-PKBM) Nasional, 2008: 25.

Dari kondisi seperti di atas, dibutuhkan pengembangan dan pembinaan melalui pelatihan kompetensi yang intensif bagi pengelola-pengelola PKBM. Pelatihan akan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memperbaiki kondisi PKBM secara bertahap dan komprehensif. Perbaikan dimulai dari perubahan pola pikir para pengelola, pengembangan organisasi (manajerial dan leadership), pengembangan kerjasama dan persaingan, manajemen mutu terpadu dan manajemen belajar, manajemen strategis, sampai dengan pengembangan program-program belajar yang berbasis kebutuhan belajar masyarakat. Apabila hal ini sampai tidak dilakukan atau berlarut-larut, dikhawatirkan kondisi ini akan menjadi bertambah terpuruk. PKBM sebagai lembaga strategis dalam pendidikan nonformal untuk mengembangkan

program-programnya di masyarakat. Program-program tersebut diharapkan dapat menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mencetak kader-kader yang dapat berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, sehingga mampu mengurangi terjadinya kesenjangan di masyarakat.

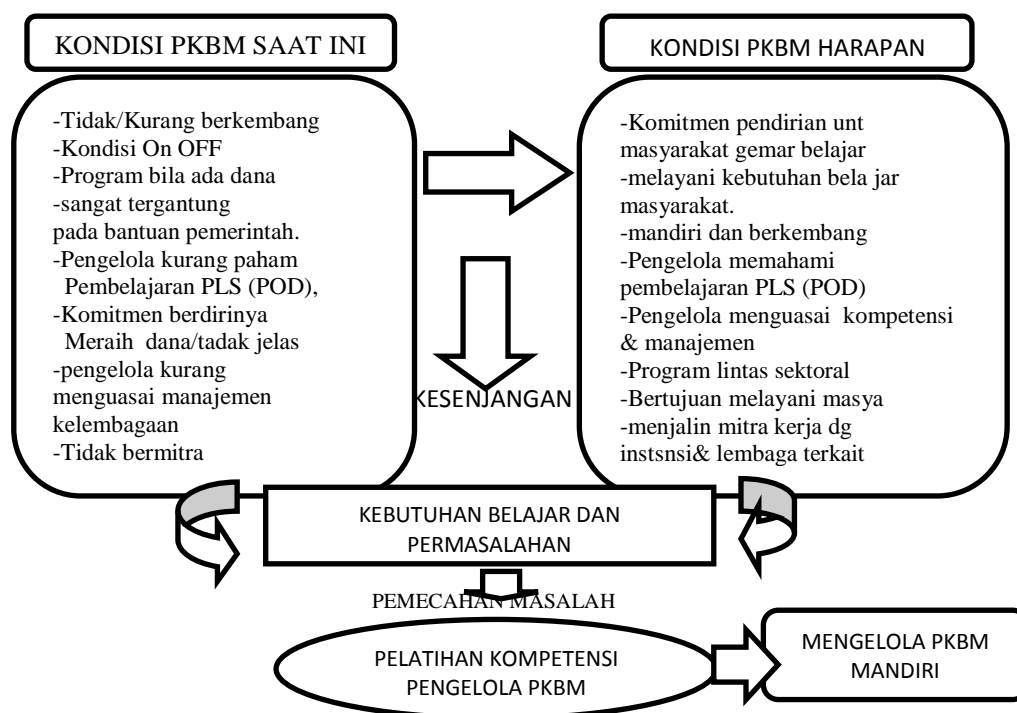
B. Identifikasi Masalah Penelitian

Setiap penyusunan program pendidikan luar sekolah selalu diawali dengan melakukan kegiatan penting yaitu identifikasi kebutuhan dan sumber belajar. Kurikulum dan program pendidikan luar sekolah selalu disusun dari bawah (*bottom up*) ke atas (*top down*), bukan sebaliknya. Peserta didik sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran. Kegiatan identifikasi kebutuhan sangat menentukan keberhasilan suatu program pendidikan luar sekolah. Keberhasilan dalam melakukan identifikasi kebutuhan, berarti sebagian keberhasilan program telah dapat diraih, maka sangat penting dilakukan kegiatan identifikasi kebutuhan secara mendalam dan menyeluruh terkait dengan sasaran program pembelajaran dan sasaran didik.

Identifikasi kebutuhan awal dilakukan pada PKBM di Jawa Timur, ditemukan permasalahan-permasalahan dalam mengelola PKBM, mengapa PKBM tidak beranjak dari sejak berdirinya, mengapa lembaga PKBM tidak nampak perkembangannya, seperti stagnan, sehingga secara kelembagaan PKBM nampak lemah dan tidak berdaya.

Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan dari pengamatan peneliti dalam mengelola PKBM, antara lain: 1) PKBM sebagai lembaga maupun wadah belum menjadi wahana pembelajaran masyarakat, masih kental mejadi kebutuhan lembaga pemerintah; 2) pengelola PKBM masih bersifat umum saja, belum mengarah pada penguasaan konsep pendidikan nonformal yang berorientasi pada pendidikan orang dewasa, dan memiliki kompetensi pengelola; 3) PKBM sangat tergantung pada dana bantuan pemerintah, belum menunjukkan kemandirian dalam mengelola lembaga; 4) kondisi PKBM masih lemah, belum menunjukkan perkembangan yang memadai dengan komitmen pengelola agar lembaga memiliki roh; 5) belum nampak adanya pendampingan dalam setiap program yang dikembangkan; 6) program dikembangkan atas dasar kebutuhan PKBM, bukan atas dasar kebutuhan belajar masyarakat, karena belum melakukan identifikasi kebutuhan secara intensif; 7) program

masih bersifat proyek, belum berlangsung secara berkesinambungan dan belum mengacu pada kebutuhan masyarakat dalam data base; 8) belum nampak adanya kerjasama antar PKBM, dan memfungsikan FK-PKBM dalam menjalankan lembaga; 9) tenaga pengelola PKBM kurang mendapatkan pelatihan, terutama berkaitan dengan pendidikan nonformal dan andragogi, sehingga mengelola PKBM secara tradisional; 10) belum adanya tenaga ahli atau nara sumber yang mendampingi PKBM dalam menjalankan fungsinya; 11) belum nampak upaya yang keras untuk memberdayakan masyarakat dan menjadikan masyarakat gemar belajar; 12) kurang dikembangkan adanya program maupun produk unggulan yang dapat dikerjasamakan dengan Du/Di, karena program PKBM belum fokus; 13) program PKBM sangat kental dari pemerintah, belum mampu melaksanakan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat; dan 14) PKBM sangat tergantung pada program pemerintah yang kemampuannya sangat terbatas, belum adanya keterlibatan tokoh masyarakat, tenaga akademisi, FK-PKBM, dan Dunia usaha / Dunia industri, dalam memperkuat kelembagaan PKBM.



Gambar: 1.1. Proses Menentukan Kebutuhan Belajar.

Sumber: Pemikiran Peneliti.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari hasil identifikasi terangkum permasalahan dalam mengelola PKBM di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan penelitian dibatasi pada peningkatan kompetensi pengelola dalam mengelola PKBM mandiri. Perkembangan suatu organisasi atau lembaga, lebih-lebih perkembangan organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial, pengelola memegang peranan yang sangat penting dan dominan dalam memajukan lembaga. Pengembangan kelembagaan dan program-program untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang sangat kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat berasal dari komitmen pengelola, pengetahuan pengelola, keterampilan pengelola, wawasan, serta pola pikir pengelola. Oleh karena itu pengelola PKBM harus memiliki kemampuan manajerial, dan leadership, sehingga menjadi sasaran utama dalam membenahi pengelolaan untuk penguatan kelembagaan dalam pengelolaan PKBM mandiri. Model pelatihan yang dikembangkan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah model pelatihan berbasis kompetensi dan meningkatkan kemampuan pengelola dalam pengelolaan PKBM mandiri. Model pelatihan berbasis kompetensi merupakan proses pembelajaran bagi pengelola PKBM dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola PKBM mandiri. Sedangkan meningkatkan kemampuan pengelola adalah suatu upaya pembelajaran mengenai standar minimal kompetensi pengelola PKBM dalam pengelolaan PKBM mandiri. Kompetensi pengelola terdiri dari kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi manajerial. Pengelola diharapkan memiliki wawasan pengetahuan, sikap dan keterampilan, sehingga mampu memperkuat komitmen, dan merubah pola pikir mereka untuk memperkuat kelembagaan PKBM agar menjadi lebih kuat dan tangguh dalam mengelola PKBM mandiri. Kompetensi yang dimiliki dan mampu mengimplementasikan dalam mengelola PKBM mandiri menjadi tujuan penelitian. Hal ini dijadikan dasar dalam rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi pengelolaan PKBM saat ini dalam mengelola PKBM mandiri di Jawa Timur ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pelatihan saat ini untuk meningkatkan kompetensi pengelola PKBM di Jawa Timur ?
3. Bagaimanakah kondisi kompetensi pengelola saat ini dalam mengelola PKBM mandiri di Jawa Timur ?
4. Bagaimanakah model konseptual pelatihan mengelola PKBM untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam mengelola PKBM mandiri ?
5. Bagaimanakah implementasi model pelatihan mengelola PKBM untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam mengelola PKBM mandiri ?
6. Bagaimanakah efektivitas model pelatihan mengelola PKBM untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam mengelola PKBM mandiri ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, baik secara umum maupun khusus, sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:

Dalam penelitian ini secara umum, tujuan penelitian yang diharapkan dapat dicapai adalah menghasilkan pengembangan model pelatihan mengelola PKBM untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam mengelola PKBM mandiri di Wilayah Jawa Timur.

2. Tujuan Khusus:

- a. Mengetahui kondisi pengelolaan PKBM saat ini dalam mengelola PKBM Mandiri di Jawa Timur.
- b. Mengetahui pelaksanaan pelatihan saat ini untuk meningkatkan kompetensi pengelola PKBM di Jawa Timur.
- c. Mengetahui kondisi kompetensi pengelola PKBM saat ini dalam mengelola PKBM mandiri di Jawa Timur.
- d. Menyusun model konseptual pelatihan mengelola PKBM untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam mengelola PKBM mandiri.

- e. Mengimplementasikan model pelatihan mengelola PKBM untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam mengelola PKBM mandiri.
- f. Mengetahui efektivitas model pelatihan mengelola PKBM untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam mengelola PKBM mandiri.

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap aktivitas sudah pasti berharap ada manfaat yang diperolehnya. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, baik secara kelembagaan, maupun program, organisasi, kelompok ataupun perorangan untuk meningkatkan kompetensi pengelola PKBM, agar jadi lebih baik perkembangan ke depannya. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini mengembangkan konsep dan teori pelatihan, konsep dan teori andragogi pada pendidikan orang dewasa, konsep dan teori pendidikan nonformal, konsep dan teori kompetensi pengelola dalam pengelolaan PKBM, dan pengembangan konsep dan teori kewirausahaan, sehingga bermanfaat dalam upaya pengembangan konsep dan teori pendidikan nonformal terutama peningkatan kemampuan pengelola PKBM dalam mengelola PKBM mandiri.

2. Manfaat Secara Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang kuat bagi pengembangan pendidikan luar sekolah, terwujudnya peningkatan kemampuan pengelola PKBM dalam mengelola PKBM mandiri, agar dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi lembaga, masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang membutuhkan, antara lain:

- a. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dan teori pembelajaran bidang pendidikan nonformal, terutama dalam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengelola PKBM, sebagai lembaga, maupun wadah yang memberikan layanan pembelajaran bagi masyarakat. Kompetensi manajerial pengelola nampak dalam kualitas program.

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama Bidang Pendidikan Nonformal-Informal dan Nilai Budaya, untuk melakukan pelatihan mengelola PKBM untuk peningkatan kompetensi pengelola dan pembinaan terhadap PKBM yang ada di Wilayah Jawa Timur khususnya, dan PKBM yang ada di Tanah Air tercinta, sehingga PKBM dapat lebih menapakkan peran dan fungsinya di masyarakat Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan.
- c. Praktisi dan *stakeholders* dapat memanfaatkan pengelolaan PKBM mandiri untuk mengembangkan program-program pendidikan nonformal dan Informal pada PKBM yang telah berkembang di lingkungan masyarakat sekitarnya. Mengembangkan potensi lokal masyarakat dijadikan program-program unggulan dalam pengelolaan PKBM.
- d. Forum Komunikasi PKBM, Para pengelola dan penyelenggara PKBM, dapat menjadikan contoh pada pengelolaan PKBM mandiri dalam mengelolanya, dan senantiasa mengembangkan kekuatan lembaganya, karena PKBM lembaga yang strategis, dan benar-benar mampu eksis dan dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat, baik sebagai lembaga maupun wadah layanan kebutuhan belajar masyarakat, sehingga tercipta masyarakat berdaya dan gemar belajar.
- e. Pelatih dan pengembang PKBM, dapat memetik hikmah untuk mengembangkan PKBM dengan pengelola yang memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah dalam mengembangkan program-programnya, dan memberikan layanan kepada kebutuhan belajar masyarakat secara berkesinambungan.
- f. Warga belajar dan masyarakat pemerhati perkembangan pendidikan luar sekolah, dapat belajar secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengembangkan diri sebagai konsekuensi dari tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebutuhan belajar masyarakat yang sangat pesat. Pembelajaran di pendidikan luar sekolah menggunakan pendekatan *life long learning*.

F. Struktur Organisasi.

Dalam penelitian ini dikembangkan dengan lima bab. Pada bab I dikemukakan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta struktur organisasi; pada Bab II dikembangkan tentang kajian pustaka sebagai landasan teoritis penelitian, berisi teori pendidikan nonformal, teori pelatihan, teori kompetensi, teori pengelolaan, teori pendidikan orang dewasa, teori kemandirian, dan teori kewirausahaan; pada Bab III disajikan metode penelitian meliputi: subyek dan lokasi penelitian; desain penelitian; metode penelitian; definisi operasional; instrumen penelitian; proses pengembangan instrumen; teknik pengumpulan data dan alasan rasionalnya; dan analisis data, dengan pendekatan R & D (*Research and Development*), menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif; pada Bab IV dituliskan hasil penelitian dan pembahasan, meliputi studi pendahuluan, penyusunan model konseptual, ujicoba model konseptual, implementasi model, dan uji efektivitas untuk menemukan desain model akhir; dan pada Bab V dicantumkan simpulan dan saran sebagai bab penutup.